



PKL Malioboro Siap Berdialog

Forpi Desak Pemkot Tindakanjuti Dugaan Jual Beli Lapak

JOGJA - Seluruh pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro akhirnya melunak. Setelah Paguyuban Pedagang Kaki Lima Ahmad Yani (Pelmani) bersedia berdialog dengan Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), kini Paguyuban Tridharma bakal mengikuti langkah serupa. Bahkan, para PKL yang

berjualan di sebelah barat jalan ini siap mengikuti keputusan PPMAY. "Kalau pemilik lahan hanya menyediakan satu meter kami juga mau. Intinya, ditata yes digusur *no*," tegas Wakil Ketua Paguyuban Tridharma Paul Zulkarnaen saat ditemui kemarin (5/9).

Paul tak menampik bahwa lahan yang dimanfaatkan PKL adalah milik toko ■ **Baca PKL... Hal 7**

LOKASINYA STRATEGIS:
Aktivitas jual beli di salah satu PKL di kawasan Malioboro Selasa (4/9).



BADAR JOGJA FILE

DUGAAN JUAL BELI LAPAK DI MALIOBORO

Dulu hal seperti ini pernah terjadi dan tidak ada yang mau jadi saksi."

FX HARRY CAHYA
Ketua Forpi Kota Jogja



GRAFIS: HEPPI KARTUN/BADAR JOGJA

Tindak Lanjut

PKL Malioboro

Siap Berdialog

Sambungan dari hal 1

Para PKL berjualan di emperan toko selama ini hanya mengikuti jejak orang tua mereka. Lahan yang ditempati PKL adalah "warisan". Dari itu, Paul menolak tudingan jual beli lapak yang dilontarkan PPMAY.

"Yang ada di sini hanya pelimpahan lahan. Seperti dulu ditempati bapaknya lalu sekarang diteruskan oleh anaknya," ucapnya.

Meski bukan lahan milik PKL, Paul tetap menolak jika PPMAY bersikukuh meminta emperan toko mereka harus steril. Sebab, lapak PKL salah satu ikon Malioboro. Mensterilkan lapak PKL sama halnya dengan mematikan ikon Malioboro.

"Ada baiknya bekerja sama untuk membangun Malioboro," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Senin (3/9) anggota PPMAY mengadukan keresahan mereka akan keberadaan PKL Malioboro kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Ketua PPMAY Sadana Mulyono menyatakan adanya praktik jual beli lapak di trotoar dengan nilai cukup fantastis. Bahkan ada sepetak lapak dibanderol Rp 50 juta. Praktik tersebut bukan dilakukan PKL, melainkan juragan PKL yang "menguasai" banyak lapak.

Langkah PPMAY ini seolah melengkapi upaya yang ditempuh Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro Budhi Susilo. Kendati gugatannya di Pengadilan Tata

Usaha Negara Jogjakarta ditolak, pria yang akrab disapa Cuncun ini berencana menyiapkan langkah hukum berikutnya. Warga Gedongtengen itu bersikukuh upaya yang dilakukannya selama ini hanya untuk mengembalikan hak tanahnya. Lahan di depan toko yang dipakai pedagang kaki lima (PKL) selama ini adalah miliknya.

Meski Pelmani maupun Tri-dharma menampik tudingan jual beli, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja meminta pemkot menindaklanjuti aduan PPMAY. Sekalipun tudingan itu bersifat dugaan dan belum ada laporan resmi. Apalagi, kabar dugaan jual beli lapak di Malioboro sudah lama terdengar.

"Sudah lama kami mendengar masalah itu. Sekarang saatnya membuktikan kebenarannya," tegas Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba.

Agar terang benderang, Udin, sapaannya meminta PPMAY membuktikan tudingannya. Jika terbukti, Udin berpendapat tidak hanya pemkot yang harus bertindak. Aparat penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian ikut cawe-cawe melakukan penelusuran. Karena kebijakan penggunaan lahan trotoar kawasan Malioboro untuk lapak PKL juga melibatkan pemkot. Pemkot Jogja pula yang berwenang menata PKL di kawasan Malioboro.

"Siapa tahu ada 'orang dalam' ikut bermain (praktik jual beli

lapak, Red)," selidikinya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri bersikap diplomatis. Menurutnya,

persoalan PKL dan dugaan jual beli lapak harus dilihat dari berbagai aspek. Mulai kepentingan pemkot, pemilik toko, dan PKL.

Kendati begitu, dia menuntut pemkot turun tangan sesegera mungkin. Sebab, persoalan ini rentan memicu konflik (cr5/zam/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005